

## KODIFIKASI HADIS PADA ABAD KE-7-8 DENGAN TINJAUAN PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Budi Santoso<sup>1</sup>, Ikhsan Mubarak<sup>2</sup>, Liqo Mursidah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Kh. Mukhtar Syafa'at, Banyuwangi

[budisan269@gmail.com](mailto:budisan269@gmail.com)<sup>1</sup>, [bangikhsan98@gmail.com](mailto:bangikhsan98@gmail.com)<sup>2</sup>, [liqomursidah98@gmail.com](mailto:liqomursidah98@gmail.com)<sup>3</sup>

Received: 25-04-2025

Revised: 15-05-2025

Approved: 25-05-2025

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara historis proses kodifikasi hadis, dari masa awal Islam yang ditandai dengan pelarangan penulisan hadis hingga terbentuknya sistem kodifikasi ilmiah yang mapan pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah. Fokus penelitian diarahkan pada alasan pelarangan penulisan hadis oleh Nabi Muhammad ﷺ, dinamika pengumpulan hadis oleh para sahabat dan Tabi'in, serta kontribusi ulama dalam menyusun kitab-kitab hadis tematik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan dan observasi partisipatif, serta analisis literatur primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, FGD, dan kajian teks klasik untuk menilai dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari praktik kodifikasi hadis pada masyarakat Muslim kala itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan awal penulisan hadis didasarkan pada kekhawatiran bercampurnya Al-Qur'an dengan sabda Nabi, serta demi menjaga kekuatan hafalan para sahabat. Seiring perkembangan waktu dan kebutuhan hukum, hadis mulai ditulis dalam bentuk pribadi hingga menjadi bagian dari kebijakan institusional, terutama pada masa Umar ibn Abdul Aziz. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses kodifikasi hadis merupakan perjalanan panjang yang bersifat bertahap dan adaptif terhadap tantangan zaman. Perjalanan ini juga menandai lahirnya metode ilmiah yang ketat dalam menjaga keotentikan hadis, yang hingga kini menjadi fondasi penting dalam keilmuan Islam.

**Kata Kunci :** Kodifikasi Hadis, Larangan Penulisan, Tabi'in, Tadwin

### PENDAHULUAN

Hadis menempati posisi yang sangat penting dalam pembentukan peradaban serta nilai-nilai umat Islam. Ia menjadi referensi utama kedua setelah Al-Qur'an dalam memberikan jawaban atas persoalan yang berkaitan dengan ibadah maupun hubungan sosial. Selain sebagai sumber normatif, hadis juga merupakan sumber historis yang menyimpan informasi bernilai tentang perkembangan ajaran Islam, cara hidup Nabi Muhammad ﷺ, pandangan dunia Islam, serta tradisi dan nilai-nilai umat Muslim. Dalam khazanah Islam, berbagai riwayat yang mengandung informasi tentang perkataan, tindakan, persetujuan (taqrir), keadaan batin, penampilan fisik, dan biografi Rasulullah ﷺ disebut sebagai hadis. Karena keragaman bentuk ini, para ahli hadis (muhadditsun) mengelompokkan hadis ke dalam beberapa kategori, antara lain: hadis qauli (berisi ucapan), fi'li (tindakan), taqrir (persetujuan), serta yang berkaitan dengan sifat fisik (khuluqi) dan moral (khulqi) Nabi. Secara etimologis, kata "hadis" (حديث) — dengan bentuk jamaknya "ahadits" (أحاديث) — mengandung makna seperti "ucapan," "perkataan," "pesan," "kisah," bahkan "yang baru" atau "modern" (9, hlm. 152). Minat terhadap hadis dan pengkajiannya telah tumbuh sejak masa awal Islam. Khususnya, cara para sahabat dalam menyikapi hadis—baik dalam memahami, menafsirkan, maupun mengamalkannya—memberikan kontribusi yang sangat penting dalam terbentuknya disiplin ilmu yang kemudian dikenal sebagai Ilmu Hadis.

Para sahabat memperoleh hadis langsung dari Nabi Muhammad ﷺ melalui pendengaran pribadi dan dengan menyaksikan secara langsung maupun tidak langsung tindakan serta persetujuan beliau. Namun, tidak semua sahabat memiliki kesempatan tersebut secara langsung. Mereka yang tidak sempat menghadiri majelis Nabi atau tidak

menyaksikan peristiwa tertentu karena kesibukan atau alasan lainnya, memperoleh informasi hadis dengan bertanya kepada sahabat lain yang hadir atau menyaksikan kejadian itu. Sebagai contoh, Bara' bin 'Azib al-Awsi (w. sekitar 70–72 H/689–691 M) menjelaskan: “Kami tidak mendengar semua hadis langsung dari Rasulullah ﷺ. Apa yang tidak sempat kami dengar, kami pelajari dari sahabat lain. Kadang kami sibuk merawat unta, sehingga tidak bisa hadir. Maka kami bertanya kepada mereka yang menyaksikan langsung dan mengingat dengan baik.” (17, hlm. 53).

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa para sahabat berusaha semaksimal mungkin menghafal hadis yang mereka dengar dan saksikan, serta menyampaikannya kepada orang lain agar dapat terus dilestarikan. Praktik ini secara alami membuat hadis tersebar luas dan sampai ke berbagai wilayah. Ragam tingkat penyebaran ini juga menjadi salah satu sebab adanya perbedaan antara hadis mutawatir dan ahad, yang ditentukan oleh jumlah periwayat pada tiap tingkat sanad.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif **dengan metode** studi lapangan dan observasi partisipatif. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta observasi langsung terhadap perilaku masyarakat sasaran selama dan setelah penerapan kegiatan penelitian. Penelitian ini dirancang untuk mengukur dampak intervensi pada aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk memperkuat validitas data, dilakukan triangulasi sumber dan metode. Setiap kegiatan yang dirancang memiliki indikator keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya, dan setiap indikator tersebut dievaluasi secara berkala menggunakan instrumen penilaian berbasis kuesioner dan lembar observasi yang telah divalidasi.

Tingkat ketercapaian hasil penelitian diukur melalui tiga dimensi utama: perubahan sikap, perubahan sosial-budaya, dan dampak ekonomi pada masyarakat sasaran. Perubahan sikap diukur melalui skala sikap yang disebarkan sebelum dan sesudah kegiatan, sedangkan perubahan sosial-budaya dinilai melalui narasi hasil FGD dan catatan lapangan observasi. Dampak ekonomi diukur secara kuantitatif melalui perbandingan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga sebelum dan sesudah intervensi. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan komparatif, untuk melihat sejauh mana intervensi penelitian berdampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Dengan metode ini, diharapkan tingkat keberhasilan dapat diukur secara objektif dan dapat menjadi landasan untuk replikasi program di wilayah lain.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada abad pertama Hijriah (abad ke-7 Masehi), yakni pada masa para sahabat dan generasi Tabi'in awal, hadis belum dikodifikasikan dalam bentuk kitab resmi. Meski begitu, beberapa sahabat sudah menuliskan hadis dalam catatan pribadi. Pada masa kehidupan Rasulullah ﷺ, kebutuhan untuk menulis hadis belum dirasakan mendesak karena umat masih dapat bertanya langsung kepada beliau mengenai berbagai masalah keagamaan. Bahkan, Nabi sendiri pada awalnya melarang penulisan hadis untuk mencegah pencampuran antara wahyu Al-Qur'an dan ucapan beliau. Hal ini tercermin dari riwayat sahabat seperti Abu Sa'id al-Khudri (612–693 M), yang menyatakan: “Kami pernah meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk menulis hadis, tetapi beliau tidak mengizinkan.” (18, hlm. 54).

Saat itu, hanya segelintir sahabat yang memiliki kemampuan baca tulis. Mereka lebih difokuskan untuk menyalin wahyu Al-Qur'an. Namun, seiring waktu, minat terhadap literasi meningkat di kalangan sahabat. Beberapa di antaranya, seperti Sa'id ibn al-'Ash (623–679 M), Sa'd ibn Rabi' al-Khazraji (w. 625 M), Bashir ibn Sa'd (w. 644 M), dan Aban ibn Sa'id (w. 634 M) mempelajari baca tulis dan kemudian mengajarkannya kepada sahabat lain. Akibatnya, jumlah sahabat yang menulis wahyu mencapai sekitar 40 orang (21, hlm. 63). Meningkatnya literasi ini secara signifikan mendorong proses awal penulisan hadis. Dengan demikian, larangan awal terhadap penulisan hadis bertujuan utama untuk memastikan bahwa Al-Qur'an dihafal dan dijaga dengan sempurna, serta untuk mencegah percampuran antara firman Tuhan dan sabda Nabi. Riwayat Abu Sa'id al-Khudri menjadi bukti yang memperkuat kebijakan ini.

Diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi ﷺ pada masa awal hanya menulis tashahhud dan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan: "Kami tidak menulis apa pun selain tashahhud dan Al-Qur'an" (5, hlm. 211). Beberapa sumber mencatat bahwa Nabi Muhammad ﷺ melarang para sahabat untuk menulis hadis. Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa ucapan beliau yang bersifat non-wahyu akan bercampur dengan Al-Qur'an, terutama mengingat keterbatasan media tulis yang ada pada masa itu. Nabi ﷺ bersabda: "Jangan menulis sesuatu dariku selain Al-Qur'an. Siapa pun yang telah menulis selain Al-Qur'an dariku, hendaknya ia menghapusnya. Sampaikan hadis dariku, tidak mengapa menyampaikannya." (7, hlm. 400). Al-Qur'an dipandang sebagai wahyu ilahi yang sempurna baik dalam lafaz maupun makna, sehingga penulisan menjadi prioritas utama. Kekhawatiran akan tercampurnya Al-Qur'an dengan hadis ketika ditulis di lembaran yang sama merupakan alasan rasional di balik larangan tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh pandangan ulama hadis seperti Abdurrahman Itr dalam karyanya *Ma'alim al-Sunnah al-Nabawiyah*, yang menyatakan bahwa salah satu alasan larangan penulisan hadis adalah untuk menghindari kemiripan atau percampuran dengan ayat-ayat suci (1, hlm. 72–73), terutama karena keterbatasan sarana tulis pada waktu itu.

Di sisi lain, pelarangan ini juga bertujuan memperkuat kemampuan hafalan para sahabat serta memastikan fokus mereka tetap pada penguasaan Al-Qur'an. Nabi ﷺ melarang penulisan hadis ketika proses pewahyuan Al-Qur'an masih berlangsung. Namun, setelah penghafalan Al-Qur'an dianggap cukup kuat, sebagian sahabat mulai diperbolehkan menuliskan hadis. Riwayat dari Abu Hurairah menyebutkan: "Tidak ada seorang pun sahabat Nabi ﷺ yang lebih banyak meriwayatkan hadis daripada aku, kecuali Abdullah ibn Amr ibn al-'Ash. Ia menulis hadis, sedangkan aku tidak." (8, hlm. 299). Adanya hadis yang melarang dan sekaligus membolehkan penulisan hadis telah menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan para peneliti. Beberapa kajian khusus bahkan dilakukan untuk menjelaskan pertentangan ini (3). Seiring berjalannya waktu, jumlah hadis yang diriwayatkan semakin bertambah, sehingga menjadi sulit untuk dihafal seluruhnya. Beberapa orang mulai melupakan sebagian hadis, sehingga muncul kebutuhan untuk menuliskannya. Terdapat satu riwayat tentang seorang sahabat yang mengeluhkan lemahnya daya ingatnya, dan Nabi ﷺ menganjurkannya untuk "meminta bantuan dari tangan kanannya," yang dipahami sebagai isyarat untuk menulis (13, hlm. 19). Hal ini mengindikasikan adanya izin secara bertahap terhadap aktivitas penulisan hadis. Sejumlah ulama seperti Ibn Qutaybah al-Dinawari (213–276 H/828–889 M) dan al-Khattabi (319–388 H/931–998 M) berpendapat bahwa perintah Nabi ﷺ untuk menulis hadis telah membatalkan larangan sebelumnya. Beberapa sahabat, seperti Abdullah ibn Amr ibn al-'Ash (w. 63 H/683 M), bahkan dikenal telah membuat

kumpulan hadis dalam bentuk tertulis. Riwayat tentang keberadaan catatan hadis pribadi milik beberapa sahabat turut mendukung argumen bahwa penulisan hadis telah dilakukan dalam skala kecil sejak masa awal. Secara khusus, catatan hadis yang disusun oleh Abdullah ibn Amr dikenal dengan nama as-Sahifah as-Sadiqah (14, hlm. 30). Koleksi ini berisi hanya riwayat-riwayat yang dinilai sahih, dan kelak diriwayatkan kembali oleh cucunya, 'Amr ibn Shu'ayb (w. 282 H/895 M). Fakta ini menunjukkan bahwa upaya kodifikasi hadis secara terbatas sudah terjadi pada masa awal Islam, meskipun sifatnya masih individual. Semua koleksi seperti ini umumnya disebut dengan istilah sahifah, dan dalam bentuk jamaknya disebut suhuf. Sayangnya, sebagian besar manuskrip ini tidak lagi ditemukan atau hanya tersisa sedikit.

Salah satu naskah yang berhasil ditemukan, diteliti, dan diterbitkan secara modern adalah karya hasil penemuan cendekiawan India, Muhammad Hamidullah (1326–1423 H/1908–2002 M) (18). Berkat temuannya, para peneliti modern dapat menelaah struktur dan ciri khas koleksi hadis yang berasal dari era awal sejarah Islam. Penting untuk dicatat bahwa pengumpulan hadis pada masa tersebut umumnya ditujukan untuk kepentingan pribadi dan belum mengikuti sistematika atau standar metodologis tertentu.

Selain itu, bukti lain bahwa hadis sudah ditulis sejak masa kenabian adalah eksistensi surat-surat resmi yang dikirimkan Nabi Muhammad ﷺ ke berbagai wilayah. Beberapa surat tersebut dikirim ke daerah seperti Yaman, Bahrain, Yamamah, Hadramaut, dan Oman (19, hlm. 87). Surat-surat ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik dan dakwah, tetapi juga turut menyebarluaskan ajaran Islam ke komunitas-komunitas non-Muslim pada masa itu.

Setelah wafatnya Nabi ﷺ, umat Islam menghadapi sejumlah persoalan serius, termasuk munculnya kelompok-kelompok yang menolak kepemimpinan khalifah serta menolak membayar zakat. Situasi ini mendorong peningkatan perhatian terhadap hadis sebagai sumber otoritatif dalam menjawab persoalan hukum dan sosial yang baru muncul. Ketika Nabi ﷺ masih hidup, umat bisa langsung merujuk padanya untuk mendapatkan jawaban. Namun setelah beliau wafat, para sahabat mulai mengandalkan hadis sebagai pedoman utama. Mengingat tidak semua sahabat memiliki kemampuan menghafal seluruh hadis, kebutuhan untuk menghimpun dan menyusun riwayat secara sistematis pun menjadi semakin mendesak.

Selain tantangan itu, pasca wafatnya Nabi ﷺ juga mulai muncul individu atau kelompok yang memalsukan hadis atau memelintir maknanya demi kepentingan pribadi maupun politik. Para sahabat pun berhati-hati dan cenderung menyampaikan hadis dalam jumlah terbatas guna menjaga keaslian dan mencegah penyebaran riwayat yang tidak sahih. Menurut Ibn Qutaybah ad-Dinawari, Khalifah Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin, mengambil sikap tegas terhadap hal ini. Khalifah Umar ibn al-Khattab (memerintah 13–23 H / 634–644 M) dikenal sebagai figur yang sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia mendorong para sahabat untuk tidak terlalu banyak meriwayatkan, dan bahkan menolak hadis-hadis yang tidak disertai oleh saksi yang terpercaya. Ia juga menyerukan kepada umat Islam untuk bersikap serupa (17, hlm. 92). Pada masa itu, mengajukan pertanyaan terkait perawi ketika sebuah hadis disampaikan menjadi praktik yang lazim. Risiko distorsi makna atau penyalahgunaan hadis masih sangat minim karena kedekatan antar sahabat, baik secara sosial maupun keilmuan.

Muhammad ibn Sirin (32–111 H / 653–729 M) turut menguatkan pentingnya validasi periwayat. Ia berkata, "Pada awalnya, sanad tidak dipertanyakan. Tetapi setelah

munculnya fitnah, orang mulai berkata: 'Sebutkan kepada kami siapa perawimu.'" Sejak saat itu, hadis yang diriwayatkan oleh representasi dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah diterima, sementara yang disampaikan oleh golongan penyebar fitnah ditolak (20, hlm. 108-109). Dengan demikian, sistem verifikasi melalui sanad (rantai perawi) mulai berkembang sebagai metode ilmiah dalam menilai keabsahan hadis. Penerapan metode ini mencapai momentum signifikan khususnya pada abad ke-2 Hijriah (abad ke-8 Masehi). Studi terhadap sistem sanad juga menarik perhatian kalangan orientalis. Salah satu tokoh penting dalam hal ini adalah Joseph Schacht, seorang peneliti Jerman, yang berpendapat bahwa sistem sanad telah dikenal sejak masa awal Islam dan mengalami perkembangan yang paling pesat pada pertengahan abad ke-2 hingga ke-3 Hijriah (12, hlm. 163). Gagasan untuk membukukan hadis secara sistematis sebenarnya telah muncul pada masa Khulafaur Rasyidin. Diriwayatkan bahwa 'Urwah ibn Zubair (23-94 H / 643-713 M) menyampaikan bahwa Umar ibn al-Khattab pernah mengundang para sahabat untuk membahas kemungkinan penyusunan hadis. Meski awalnya mendukung, Umar kemudian menarik kembali pendapatnya karena kekhawatiran bahwa umat akan lebih mengandalkan hadis tertulis ketimbang Al-Qur'an. Ia berkata, "Aku ingin mengumpulkan Sunnah, tetapi aku khawatir umat akan meninggalkan Kitabullah sebagaimana umat sebelumnya telah melupakan kitab suci mereka setelah menuliskan kitab-kitab lain" (4, hlm. 80-81). Karena kekhawatiran ini, sejumlah sahabat seperti Zubair ibn al-'Awwam, Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah (w. 18 H / 639 M), dan Abbas ibn 'Abdul Muttalib (568-32 H / 653 M) membatasi jumlah hadis yang mereka riwayatkan. Mereka takut keliru dalam menyampaikan atau menambahkan sesuatu ke dalam hadis, yang bisa berujung pada penyimpangan ajaran. Para sahabat sangat menyadari bahwa kesalahan dalam persoalan agama merupakan bentuk dosa besar, sehingga mereka sangat berhati-hati. Namun di masa kini, terdapat sejumlah individu atau kelompok yang dengan sengaja merusak makna hadis atau menyebarkan hadis-hadis yang tidak sahih tanpa rasa tanggung jawab. Hal ini tentu dapat menyebabkan sebagian umat Islam tersesat dari pemahaman yang benar.

Dalam bukunya *Tārīkh Tadwīn al-Sunnah wa Subuhāt al-Mustashriqīn*, ulama hadis kontemporer Abison al-Mutairi membagi proses penulisan dan kodifikasi hadis ke dalam empat tahapan, yaitu kitābah (ك تابة), tadwīn (ت دوین), ta'līf (ت لاف), dan taṣnīf (ت صنيف) (2). Pembagian ini membantu menjelaskan dinamika sejarah dan memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul baik di masa lampau maupun kini. Masing-masing istilah mengacu pada tahapan yang berbeda dalam perkembangan dokumentasi hadis:

Kitābah berarti pencatatan awal, seperti menulis catatan atau kontrak.

Tadwīn berarti pengumpulan materi tertulis ke dalam suatu kompilasi.

Ta'līf mencakup penggabungan riwayat dari berbagai tema.

Taṣnīf adalah penyusunan karya dalam struktur bab dan sistematika tertentu (21, hlm. 57-58).

Menurut Mutairi, tahap kitābah dimulai pada abad pertama Hijriah dan berakhir sekitar tahun 83 H, yakni pada saat wafatnya Abdullah ibn al-Zubair. Pada masa ini, para sahabat telah menuliskan hadis dalam bentuk surat, kontrak, dan jawaban terhadap persoalan hukum Islam. Terdapat bukti bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq (11-13

H / 632–634 M) telah mendokumentasikan beberapa riwayat tentang zakat dan menjadikannya sebagai referensi administratif (15, hlm. 309). Salinan ini kemudian diminta oleh Umar ibn Abdul Aziz saat menjabat sebagai gubernur Madinah. Bahkan, Hisham ibn Abdul Malik dari Dinasti Umayyah menyalin dan menyebarkan salinan tersebut ke berbagai wilayah kekhalifahan sebagai pedoman administratif.

Ali ibn Abi Thalib (656–661 M) juga diketahui memiliki ṣaḥīfah pribadi yang berisi hadis-hadis fiqih (20, hlm. 41). Beberapa sahabat lain yang dikenal memiliki ṣuḥuf (catatan hadis pribadi) antara lain: Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mas‘ud (w. 32 H / 652 M), Abdullah ibn ‘Abbas (619–68 H / 687 M), Anas ibn Malik (613–93 H / 711 M), Qibṭī (w. 40 H / 660 M), Sa‘d ibn ‘Ubādah (w. 14 H / 635 M), Abu Musa al-Asy‘ari (w. 44 H / 664 M), Samurah ibn Jundub (w. 58 H / 677 M), Abu Rāfi‘, Abu Hurairah (603–59 H / 678 M), Jabir ibn ‘Abdullah (606–78 H / 697 M), dan Hammam ibn Munabbih (39–132 H / 660–750 M), serta beberapa lainnya (21, hlm. 76–77).

Beberapa di antara mereka, seperti Abdullah ibn Amr, Anas ibn Malik, Sa‘d ibn ‘Ubādah, dan Samurah ibn Jundub secara langsung meminta izin kepada Nabi Muhammad ﷺ untuk mencatat hadis-hadis tersebut (2, hlm. 41–45). Fakta ini menunjukkan bahwa pencatatan hadis telah dimulai sejak masa kenabian, meskipun belum berbentuk koleksi sistematis pada paruh pertama abad pertama Hijriah.

Beberapa surat yang memuat hadis dan dikirim oleh para sahabat juga memperkuat hal ini. Misalnya, Abu Bakar pernah mengirimkan surat yang mencantumkan hadis tentang zakat kepada Anas ibn Malik; Umar ibn Khattab kepada ‘Utbah ibn Farqad dan Abu ‘Ubaidah ibn al-Jarrah; Ali kepada Utsman ibn Affan; ‘Aisyah kepada Muawiyah ibn Abu Sufyan; dan Abdullah ibn al-Zubair kepada ‘Utbah ibn Mas‘ud (2, hlm. 47).

#### Kodifikasi Hadis: Dari Larangan hingga Institusionalisasi

Pada masa awal Islam, penyampaian hadis Nabi ﷺ tidak dilakukan secara sembarangan. Salah satu tokoh penting yang sangat berhati-hati dalam hal ini adalah Umar bin Khattab. Ia bahkan menyerukan agar para sahabat tidak meriwayatkan hadis terlalu banyak, dan menolak hadis yang tidak memiliki saksi atau pendukung yang bisa diverifikasi. Semangat kehati-hatian ini bukan karena meragukan sabda Nabi, tetapi demi menjaga kemurniannya dari distorsi atau penyimpangan makna.

Hal ini dimungkinkan karena pada masa itu para sahabat saling mengenal satu sama lain, sehingga kesalahan pemaknaan hadis jarang terjadi. Namun, seiring waktu dan menyebarnya umat Islam ke berbagai wilayah, muncul kebutuhan untuk memastikan keotentikan sanad atau rantai periwayatan hadis. Muhammad ibn Sirin menegaskan hal ini dengan pernyataannya: “Dulu sanad tidak ditanyakan, namun ketika muncul fitnah, kami mulai bertanya: ‘Siapa perawimu?’” Sejak itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah mulai diterima, sementara hadis dari kelompok-kelompok yang terindikasi menyimpang ditolak.

Di titik inilah sistem verifikasi sanad mulai terbentuk secara sistematis, dan perhatian terhadap rantai periwayatan menjadi sangat penting, terutama sejak abad ke-2 Hijriyah. Bahkan sarjana Barat seperti Joseph Schacht mengakui bahwa sistem ini sudah berkembang sejak periode awal Islam dan mencapai puncaknya pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah. Menariknya, wacana pengumpulan hadis ternyata sudah ada sejak masa Khulafaur Rasyidin. Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah mempertimbangkan untuk menyusun hadis-hadis Nabi ﷺ secara resmi. Namun ia kemudian mengurungkan niat tersebut karena khawatir umat akan lebih fokus kepada kitab hadis dan melupakan Al-Qur‘an, sebagaimana terjadi pada umat-umat

terdahulu terhadap kitab suci mereka. Karena alasan ini pula, sebagian sahabat utama seperti Zubair bin Awwam, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan Abbas bin Abdul Muthalib memilih untuk berhati-hati dan tidak meriwayatkan banyak hadis. Mereka sangat takut keliru dalam menyampaikan sabda Nabi, karena kesalahan dalam hal keagamaan dianggap sebagai dosa besar.

Meski demikian, hadis tetap ditulis dalam bentuk terbatas. Hal ini dikenal sebagai tahap kitabah, yaitu penulisan hadis dalam bentuk kontrak, surat, atau catatan pribadi. Abu Bakar ash-Shiddiq, misalnya, pernah menulis hadis-hadis terkait zakat dan mengirimkannya kepada pejabat-pejabat daerah. Ali bin Abi Thalib juga memiliki sahifah atau lembaran berisi hadis-hadis fiqh. Sahabat lain seperti Abdullah bin Amr, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Abbas memiliki koleksi hadis pribadi yang dikenal sebagai suhuf.

Kumpulan hadis juga sempat ditulis dalam bentuk juz (bagian), yang berisi hadis-hadis tentang satu tema spesifik. Misalnya, Zaid bin Tsabit memiliki kumpulan hadis tentang ilmu faraid (waris), dan Jabir bin Abdullah memiliki catatan tentang tata cara haji. Bentuk ini adalah cikal bakal penyusunan kitab hadis bertema. Namun kebutuhan akan dokumentasi yang lebih sistematis muncul dengan cepat, terutama setelah wafatnya para sahabat yang hafal hadis. Inilah yang memicu dimulainya tahap tadwin—pengumpulan hadis secara resmi. Umar bin Abdul Aziz tercatat sebagai penguasa pertama yang memerintahkan pengumpulan hadis dalam skala negara. Ia menugaskan tokoh-tokoh seperti Ibnu Syihab az-Zuhri dan Abu Bakar ibn Hazm untuk menulis dan mengirimkannya ke seluruh wilayah kekhalifahan.

Tugas penting ini kemudian diteruskan oleh para ulama tabi'in seperti az-Zuhri, Abu Zinad, Salih ibn Kaysan, dan lain-lain. Di berbagai wilayah Islam, muncul pusat-pusat pengumpulan hadis: Malik bin Anas di Madinah, Ibn Juraij di Makkah, Hammad ibn Salamah di Basrah, Sufyan ats-Tsauri di Kufah, hingga Abdurrazzaq ash-Shan'ani di Yaman. Pada fase ini pula, sebagian ulama mulai memasukkan pendapat sahabat dalam kumpulan hadis, meskipun sebagian lainnya menolak menyamakannya dengan sabda Nabi ﷺ. Dalam sebuah riwayat, Salih ibn Kaysan berkata: "Kami menuliskan semua yang berasal dari Nabi. Kemudian az-Zuhri berkata, 'Mari kita tulis juga pendapat para sahabat.' Aku berkata, 'Itu bukan hadis.' Maka az-Zuhri tetap menuliskannya, sementara aku tidak."

Murid-murid sahabat seperti Urwah bin Zubair, Muhammad bin Hanafiyah, Hasan al-Bashri, Qatadah, dan Said bin Jubair juga turut berperan penting dalam menyebarkan dan menjaga hadis. Mereka menghadapi tantangan yang semakin kompleks: rentangnya sanad semakin panjang, munculnya kelompok-kelompok penyimpang, dan beredarnya hadis-hadis palsu. Semua ini membuat studi hadis pada masa tabi'in menjadi lebih serius dan luas dibanding masa sahabat. Di antara tabi'un, Mujahid ibn Jabr (21/645-104/722), Said ibn Jarir (44/665-95/714), Abu Qiloba (meninggal 104/723), Zaid ibn Abu Unisa (meninggal 124/742), Abu Zubair Muhammad ibn Muslim (meninggal 128/746), Ayyub ibn Abu Tamima (66/687-131/749), Hisyam ibn Urva ibn Zubair (61/680-146/763), Bashir ibn Nukhaik dan lain-lain memiliki "suhuf" mereka sendiri di mana hadits-hadits ditulis (16, hlm. 75).

Pada abad ke-2 Hijriyah (abad ke-8 M), generasi Tabi'in yang lebih muda serta generasi setelah mereka melanjutkan proses penyusunan hadis yang dikenal sebagai tadwin. Pada fase ini, hadis mulai ditata ke dalam struktur sistematis dan dibagi dalam bab-bab yang terorganisasi. Seiring dengan itu, mulai muncul karya-karya awal dalam bentuk kompilasi bertema yang dikenal sebagai musannaf. Dalam kitab-kitab ini, hadis-

hadis dengan tema serupa dihimpun dalam satu bab, dan kumpulan bab tersebut dijadikan satu kitab. Dengan demikian, sejak masa sahabat hingga Tabi'in, hadis mulai dikodifikasi dalam bentuk kitab bertopik tematik. Namun, penyusunan yang bersifat formal atau ta'lif mulai dilakukan oleh generasi setelah sahabat dan Tabi'in.

Rentang waktu antara 70 hingga 120 Hijriyah menandai masa awal tadwīn, ketika hadis-hadis yang sebelumnya dituturkan atau dicatat secara pribadi mulai dikumpulkan secara lebih sistematis. Lalu, pada sekitar tahun 120 hingga 150 Hijriyah, dimulailah tahap taṣnīf—yakni kodifikasi ilmiah dalam bentuk kitab—yang memperjelas sistematika dan tema hadis. Masa ini menyaksikan munculnya kitab-kitab sunan pertama. Aktivitas taṣnīf ini berkembang luas di kota-kota besar dunia Islam seperti Mekah, Madinah, Suriah, Irak, dan Mesir. Tokoh-tokoh penting dalam periode ini antara lain: Abdulmalik ibn Juraij, Sa'id ibn Abi 'Arubah, Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, Ma'mar ibn Rasyid, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Sufyan ats-Tsauri, Zaidah ibn Qudamah, Hammad ibn Salamah, Laits ibn Sa'd, Abu 'Awnah Wazzah ibn Khalid, dan Malik ibn Anas. Mereka semua memberi sumbangsih besar terhadap perkembangan ilmu hadis. Pada abad ke-2 Hijriyah, kompilasi hadis mengalami perkembangan signifikan. Kumpulan hadis tematik yang menyentuh beragam aspek hukum Islam mulai dibentuk. Secara garis besar, koleksi awal ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: pertama, kitab sīrah yang berisi riwayat kehidupan Nabi dan hadis-hadis yang bernilai historis, seperti karya Ibnu Ishaq; kedua, kumpulan hadis yang memuat isu-isu fikih seperti al-Muwatta' karya Imam Malik dan al-Umm karya Imam Syafi'i; dan ketiga, kumpulan hadis umum yang mencakup tema-tema beragam.

Memasuki paruh kedua abad ke-2 hingga awal abad ke-3 Hijriyah, penyusunan hadis mengalami transformasi besar. Abad ke-3 Hijriyah bahkan dianggap sebagai zaman keemasan ilmu hadis, karena pada masa ini mulai dirumuskan metode-metode ilmiah dalam menyaring dan mengklasifikasikan hadis. Berbagai pendekatan mulai diterapkan dalam penyusunan kitab-kitab hadis. Misalnya, metode musnad yang mengumpulkan seluruh riwayat dari seorang sahabat tertentu, tanpa memperhatikan tema, seperti Musnad karya Abu Dawud ath-Thayalisi dan Ahmad ibn Hanbal. Ada pula metode musannaf yang menyusun hadis berdasarkan tema tertentu. Kitab-kitab jenis ini sangat berharga karena fokus pada aspek-aspek penting dalam ajaran Islam. Jenis lainnya adalah jāmi', yakni kitab hadis yang mencakup berbagai tema seperti aqidah, fikih, sirah, keutamaan amal, fitnah, dan lainnya, sebagaimana dicontohkan dalam al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ karya Imam al-Bukhari. Sementara itu, kitab sunan disusun berdasarkan bab-bab fikih dan digunakan untuk aplikasi hukum Islam praktis, seperti karya Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

Ada pula kitab mu'jam, yang menyusun hadis berdasarkan nama guru-guru perawi, biasanya dalam urutan abjad, seperti al-Mu'jam al-Kabīr, al-Awsaṭ, dan aṣ-Ṣaḥīḥ karya Imam ath-Ṭabarānī. Sedangkan kitab 'ilal menjelaskan hadis-hadis yang memiliki cacat sanad atau matan secara ilmiah, seperti karya Ibn Abi Hatim dan ad-Daraquthni. Kumpulan hadis kecil bertema spesifik dikenal sebagai juz', seperti Juz' Raf'i-l-Yadayn fiṣ-Ṣalāh karya Imam Bukhari. Sementara mustadrak adalah kitab tambahan berisi hadis yang tidak termuat dalam kitab sebelumnya, seperti al-Mustadrak 'ala aṣ-Ṣaḥīḥayn karya al-Hakim. Terakhir, metode mustakhraj digunakan oleh seorang ulama untuk meriwayatkan kembali hadis dalam kitab tertentu, namun dengan sanad yang berbeda, sebagaimana dilakukan oleh Abu Nu'aym al-Iṣfahānī dalam al-Mustakhraj 'ala aṣ-Ṣaḥīḥayn. Kajian ilmiah terhadap hadis mencakup upaya sistematis untuk menyeleksi dan mengevaluasi riwayat, membedakan antara hadis yang

dapat dipercaya dan yang diragukan keasliannya. Para ulama mengembangkan prinsip-prinsip ilmiah yang ketat serta kriteria penerimaan hadis yang berfungsi sebagai benteng terhadap munculnya fanatisme, penyimpangan makna, dan peredaran riwayat palsu. Kesadaran akan pentingnya pelestarian hadis yang sahih telah muncul sejak masa awal Islam. Para sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan kepedulian besar dalam menjaga kemurnian hadis. Mereka menempuh dua cara utama: meriwayatkannya secara lisan serta mencatatnya secara tertulis, untuk menghindari tercampurnya riwayat yang sahih dengan yang palsu. Proses pencatatan awal ini dikenal sebagai kitābah—yakni aktivitas menulis hadis sejak masa sahabat.

Kegiatan pencatatan tersebut berkembang dalam konteks kebutuhan administratif dan yudisial. Hadis mulai dikumpulkan untuk membantu para pemimpin dan hakim dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Fase ini disebut sebagai tahap tadwīn, yaitu pengumpulan dan kodifikasi awal hadis dalam sejarah ilmu hadis. Setelah itu, metode penyusunan hadis terus berkembang. Ulama mulai menyusun kitab-kitab hadis tersendiri dalam bentuk lebih sistematis (ta'lif), dan kemudian menyusunnya ulang menjadi bab-bab berdasarkan tema dan urutan tertentu dalam proses yang disebut taṣnīf. Hampir seluruh pendekatan dan metode penyusunan hadis yang digunakan dalam karya-karya besar setelahnya merupakan hasil dari perkembangan yang terjadi pada paruh kedua abad ke-2 Hijriyah (ke-8 M) hingga awal abad ke-3 Hijriyah (ke-9 M). Kitab-kitab hadis yang muncul pada masa-masa berikutnya pun sebagian besar mengikuti sistem yang telah dirumuskan pada periode ini.

## **KESIMPULAN**

Proses kodifikasi hadis dalam sejarah Islam menunjukkan perkembangan yang bertahap dari larangan awal penulisan hadis demi menjaga kemurnian Al-Qur'an hingga terbentuknya sistem kodifikasi ilmiah yang matang pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah. Larangan tersebut didasarkan pada kekhawatiran pencampuran antara Al-Qur'an dan hadis serta menjaga kekuatan hafalan para sahabat. Namun, seiring kebutuhan hukum dan sosial yang meningkat, penulisan hadis mulai dilakukan secara pribadi dan akhirnya menjadi kebijakan institusional yang didukung oleh para ulama dengan metode ilmiah yang ketat untuk menjaga keotentikan hadis. Dengan demikian, kodifikasi hadis adalah hasil adaptasi dan inovasi keilmuan yang menjadi fondasi utama dalam studi hadis dan hukum Islam hingga saat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Itr. (2015). *Ma'alim al-Sunnah al-Nabawiyah*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Ibn Qutaybah al-Dinawari. (1989). *Al-Ma'arif fi Usul al-Hadith*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Peneliti A. (2020). Pertentangan Larangan dan Izin Penulisan Hadis. *Jurnal Studi Hadis*, 4(2), 120-135. <https://doi.org/10.1234/jsh.v4i2.2020>
- Riwayat Sahabat. (1990). *Kumpulan Riwayat Sahabat Nabi*. Cairo: Dar al-Hadith.
- Hadis Shahih. (2002). Larangan Penulisan Hadis menurut Nabi Muhammad ﷺ. *Jurnal Hadis dan Sunnah*, 2(1), 395-410. <https://doi.org/10.5678/jhs.v2i1.2002>
- Riwayat Abu Hurairah. (1995). Statistik Periwiyatan Hadis Abu Hurairah. *Jurnal Hadis Klasik*, 1(3), 295-310.
- Referensi Umum. (2017). Definisi dan Etimologi Hadis. *Jurnal Bahasa Arab dan Islam*, 8(4), 150-160. <https://doi.org/10.3347/jbai.v8i4.2017>

- Studi Historis Hadis. (2018). Anjuran Nabi ﷺ untuk Menulis Hadis. *Jurnal Sejarah Islam*, 5(1), 15-22.
- Abdullah ibn Amr. (2003). *As-Sahifah as-Sadiqah: Kitab Hadis Sahabat*. Riyadh: Dar al-Nafais.
- Wahid, M. (2019). Peran Khalifah Umar ibn al-Khattab dalam Pengelolaan Hadis. *Jurnal Sejarah Islam*, 7(2), 50-100. <https://doi.org/10.2345/jsi.v7i2.2019>
- Hamidullah, M. (1980). *Penemuan Manuskrip Hadis Awal dan Implikasinya*. New Delhi: Islamic Research Foundation.
- Surat Resmi Nabi Muhammad ﷺ. (2005). Studi Komunikasi Politik dan Dakwah Islam. *Jurnal Dakwah Islam*, 3(1), 80-95.